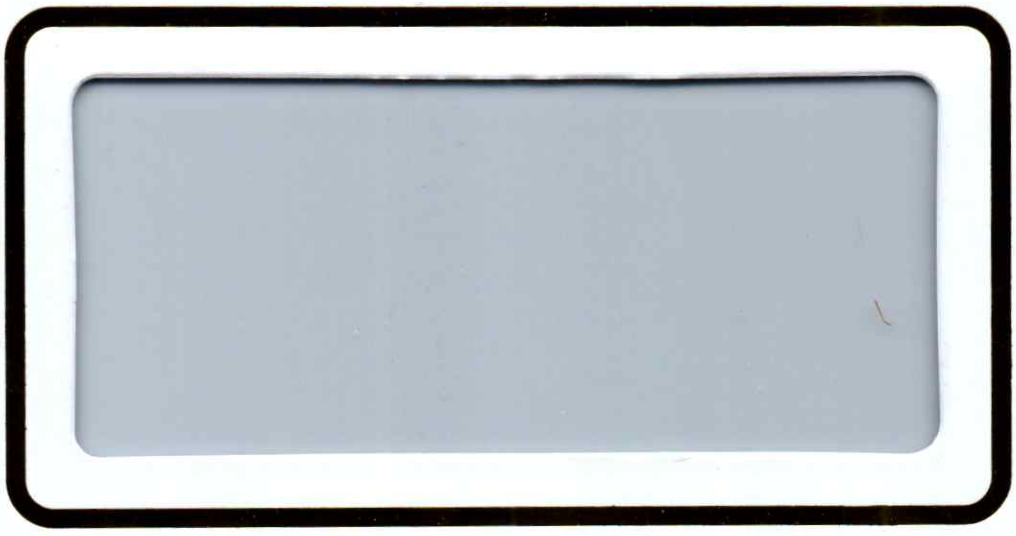


UNIVERITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
LAPORAN KEUANGAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
SERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Manajemen

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran 1

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 2

Neraca ..... 3 - 4

Laporan Operasional 5

Laporan Arus Kas 6

Laporan Perubahan Ekuitas..... 7

Catatan Atas Laporan Keuangan ..... 8 - 39

Lampiran
- Pendapatan Diterima Dimuka

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.uinjambi.ac.id

SURAT PERNYATAAN REKTOR UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TENTANG TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd.
   Alamat : Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren, Kab. Muaro Jambi, Kota Jambi, Prov. Jambi, 36363
   Jabatan : Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

2. Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

3. a. Semua informasi dalam keuangan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Badan Layanan Umum (BLU) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd.
Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jambi, 30 April 2026

KRISNAWAN, NUGROHO & FAHMY
Public Accounting Firm | License No.367/KM.1/2017

Menara 165, Lt. 12 A Unit A2, Jl. TB. Simatupang, Kav. 1, Cilandak, Jakarta 12560, Indonesia
Telp. +62 21 2297 6353 | email:contactus@knfdst.id
www.knfdts.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00124/2.1107/AU.5/11/1933-1/1/IV/2026

Kepada Yth.:
Rektor Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi**, yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) tanggal 31 Desember 2025, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Laporan neraca UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tanggal 31 Desember 2025 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab Kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit Atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap universitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, kami juga telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar tanpa pengecualian kami.

Hal Lain

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa memodifikasi atas laporan keuangan tersebut dengan nomor: 00058/3.0385/AU.5/11/1558-3/1/II/2025 pada tanggal 27 Februari 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan universitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi universitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Universitas..

Krisnawan, Nugroho & Fahmy is an independent member of IECnet Network. Each member of IECnet Network is legally separate and independent entity which practicesin its own jurisdiction and in its own rights. IECnet Network is full member of Forum of Firm

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifkasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal universitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifkan atas kemampuan Universitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifkasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan universitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifkan, termasuk setiap defsiensi signifkan dalam pengendalian internal yang teridentifkasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Krisnawan, Nugroho & Fahmy

00124

Andra Damar Jaya, M.Ak., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.1933
Izin Kantor Akuntan Publik No.367/KM.1/2017
Jakarta, 30 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	Tahun 2025		Tahun 2024
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Pendapatan Negara dan Hibah			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	90.282.886.000	91.534.984.864	89.395.333.299
JUMLAH PENDAPATAN	**90.282.886.000**	**91.534.984.864**	**89.395.333.299**
BELANJA NEGARA			
Belanja Pegawai	102.828.637.000	95.252.724.842	85.448.396.457
Belanja Barang	113.632.366.000	91.301.723.900	109.240.200.262
Belanja Modal	11.340.755.000	10.818.848.339	8.193.234.627
Belanja Sosial	21.958.200.000	21.958.200.000	19.958.400.000
JUMLAH BELANJA	**249.759.958.000**	**219.331.497.081**	**222.840.231.346**
SILPA/SIKPA		**(127.796.512.217)**	**(133.444.898.047)**
SURPLUS/DEFISIT		**(127.796.512.217)**	**(133.444.898.047)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH	
	2025	2024
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	25.962.087.647	34.666.353.414
PENGGUNAAN SAL	-	-
Sub Total	25.962.087.647	34.666.353.414
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(127.796.512.217)**	**(133.444.898.047)**
Penyesuaian SiLPA/SiKPA		
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	**129.269.262.505**	**124.740.632.280**
Pendapatan Alokasi APBN	129.887.824.089	124.840.792.237
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(618.561.584)	(100.159.957)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) setelah Penyesuaian	**1.472.750.288**	**(8.704.265.767)**
Sub Total	**1.472.750.288**	**(8.704.265.767)**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Lain-Lain	-	-
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	**27.434.837.935**	**25.962.087.647**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
NERACA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025 Audited	2024 Audited
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	*8.1, 5a*	-	-
Kas pada Badan Layanan Umum	*8.1, 5b*	27.434.837.935	25.962.087.647
Kas Lainnya dan Setara kas	*8.1, 5c*	762.070.875	1.565.657.187
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	*8.2, 5d*	84.494.000	176.528.000
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	*8.3, 5e*	6.250.000	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	*8.3, 5f*	(625.000)	-
Persediaan Badan Layanan Umum	*8.5, 5g*	1.397.984.523	743.352.110
Jumlah Aset Lancar		**29.685.012.333**	**28.447.624.944**
ASET TETAP			
Tanah	*8.7a, 5g*	373.107.997.000	373.107.997.000
Peralatan dan Mesin	*8.7b, 5g*	142.575.025.855	130.447.545.635
Gedung dan Bangunan	*8.7c, 5g*	652.871.021.791	658.101.586.961
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	*8.7d, 5g*	24.646.983.116	17.443.440.021
Aset Tetap Lainnya	*8.7e, 5g*	6.613.168.138	6.268.788.138
Konstruksi dalam Pengerjaan	*8.7f, 5g*	-	22.134.422.038
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	*8.7, 5g*	(193.716.818.899)	(152.262.682.294)
Jumlah Aset Tetap		**1.006.097.377.001**	**1.055.241.097.499**
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	*8.8a, 5h*	3.600.555.720	3.546.165.720
Aset Lain-lain (YTDDOP)	*8.8b, 5h*	6.596.256.250	646.800.000
Akumulasi Peny. dan Amortisasi Aset Lainnya	*5h*	(4.934.226.302)	(2.743.251.625)
Jumlah Aset Lainnya		**5.262.585.668**	**1.449.714.095**
JUMLAH ASET		**1.041.044.975.002**	**1.085.138.436.538**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
NERACA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025 Audited	2024 Audited
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	*9.1, 5i*	950.490.225	1.795.059.285
Pendapatan Diterima di Muka	*9.1, 5j*	314.074.073	503.814.815
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**1.264.564.298**	**2.298.874.100**
JUMLAH KEWAJIBAN		**1.264.564.298**	**2.298.874.100**
EKUITAS			
Ekuitas	*10, 5k*	1.039.780.410.704	1.082.839.562.438
JUMLAH EKUITAS		**1.039.780.410.704**	**1.082.839.562.438**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.041.044.975.002**	**1.085.138.436.538**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	Catatan	2025 Audited	2024 Audited
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan dari Alokasi APBN	*5, 6a*	129.887.824.089	124.840.792.237
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*5, 6a*	87.528.580.290	84.860.476.393
Pendapatan Hibah BLU	*5, 6a*	2.147.306.195	-
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	*5, 6a*	1.230.369.613	255.356.657
Pendapatan BLU Lainnya	*5, 6a*	1.817.436.919	3.391.344.002
JUMLAH PENDAPATAN		**222.611.517.106**	**213.347.969.289**
BEBAN			
Beban Pegawai	*7, 6b, 1*	143.077.883.799	133.671.142.114
Beban Persediaan	*7, 6b, 2*	1.291.733.161	2.529.398.480
Beban Barang dan Jasa	*7, 6b, 3*	34.123.263.503	42.186.408.556
Beban Pemeliharaan	*7, 6b, 4*	3.517.799.517	4.626.184.749
Beban Perjalanan Dinas	*7, 6b, 5*	3.848.153.601	11.496.937.060
Beban Bantuan Sosial	*7, 6b, 6*	21.958.200.000	19.958.400.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	*7, 6b, 7*	36.227.291.927	35.121.913.358
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	*7, 6b, 8*	625.000	-
JUMLAH BEBAN		**244.044.950.508**	**249.590.384.317**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN		**(21.433.433.402)**	**(36.242.415.028)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar	*6c, 1*	550.016.000	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	*6c, 1*	(22.134.422.038)	-
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) PENJUALAN ASET NON LANCAR		(21.584.406.038)	-
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	*6c, 2*	162.538.784	304.116.432
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	*6c, 2*	(618.561.584)	(100.159.957)
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(456.022.800)**	**203.956.475**
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(43.473.862.240)**	**(36.038.458.553)**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	2025 Audited	2024 Audited
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS MASUK KAS		
Pendapatan dari Alokasi APBN	129.887.824.089	124.840.792.237
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	87.620.614.290	85.441.683.812
Pendapatan dari Hasil Kerjasama	1.230.369.613	144.882.117
Pendapatan dari Hibah	350.000.000	-
Pendapatan Usaha Lainnya	1.621.446.177	3.533.371.678
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	93.993.200	175.235.735
Pendapatan PNBP Umum	68.545.584	100.159.957
JUMLAH ARUS MASUK KAS	**220.872.792.953**	**214.236.125.536**
ARUS KAS KELUAR		
Pembayaran Pegawai	143.077.883.799	133.671.142.114
Pembayaran Barang	16.987.493.870	22.324.488.508
Pembayaran Jasa	7.619.159.952	9.716.645.062
Pembayaran Barang Menghasilan Persediaan	1.956.567.584	2.757.450.334
Pembayaran Pemelihaan	3.507.597.507	4.595.879.249
Pembayaran Perjalanan Dinas	3.848.153.601	11.496.937.060
Pembayaraan Barang dan Jasa BLU Lainnya	9.557.592.429	10.126.054.392
Pembayaraan Bantuan Sosial	21.958.200.000	19.958.400.000
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	618.561.584	100.159.957
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	**209.131.210.326**	**214.747.156.676**
ARUS KAS BERSIH UNTUK AKTIVITAS OPERASI	**11.741.582.627**	**(511.031.140)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS KAS MASUK		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	187.006.000	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	363.010.000	-
JUMLAH ARUS MASUK KAS	**550.016.000**	**-**
ARUS KELUAR KAS		
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	9.873.816.819	4.823.632.265
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	493.976.080	2.917.061.013
Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.285.440	206.721.608
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	398.770.000	245.819.741
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	**10.818.848.339**	**8.193.234.627**
ARUS KAS BERSIH UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	**(10.268.832.339)**	**(8.193.234.627)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	762.070.875	1.565.657.187
JUMLAH ARUS MASUK KAS	**762.070.875**	**1.565.657.187**
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	1.565.657.187	1.139.289.573
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	**1.565.657.187**	**1.139.289.573**
ARUS KAS BERSIH (UNTUK) DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**(803.586.312)**	**426.367.614**
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	669.163.976	(8.277.898.153)
SALDO AWAL KAS	27.527.744.834	35.805.642.987
SALDO AKHIR KAS	**28.196.908.810**	**27.527.744.834**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025 Audited	2024 Audited
EKUITAS AWAL	**1.082.839.562.438**	**1.118.878.020.991**
SURPLUS/DEFISIT - LO	**(43.473.862.240)**	**(36.038.458.553)**
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(8.022.972.655)	-
Transaksi Antar Entitas	8.437.683.161	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	**414.710.506**	-
EKUITAS AKHIR	**1.039.780.410.704**	**1.082.839.562.438**

1. Gambaran Umum

a. Sejarah Pendirian

Badan Layanan Umum (BLU) disahkah menjadi satker BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017. BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara kelembagaan merupakan perguruan tinggi milik dan berada dibawah naungan Kementerian Agama. Secara teknis akademis bidang ilmu umum dibina oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan secara teknis fungsional dibina oleh Kementerian Agama.

BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah mengalami 5 (lima) tahap perkembangannya sebagai berikut:

1. Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi Agama Islam Al-Hikmah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Jambi;
2. Fakultas Syari'ah Cabang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Fakultas Syari'ah Cabang IAIN Raden Fatah Palembang;
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; dan
5. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Satuan kerja UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak tanggal 17 November 2009 telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009.

b. Tempat dan Kedudukan

Badan Layanan Umum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berlokasi di 2 (dua) tempat yang berbeda, yakni: 1) Kampus 1 (satu) berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim No.111, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124; 2) Kampus 2 (dua) yakni Jalan Jambi-Muara Bulian KM. 16, Simp. Sei Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi 36363.

c. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undangan Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

1. Gambaran Umum (Lanjutan)

c. Dasar Hukum (Lanjutan)

6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Barang/Jasa Pada BLU.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 4614).
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 492/kmk.05/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Penetapan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menerapkan PPK-BLU.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2013 tentangan Pedoman Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sektor Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama.
17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

d. Visi dan Misi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

VISI

Visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah "Menjadi Universitas Berkelas Dunia yang Berdaya Saing Global Berbasisi Kearifan Lokal dan Islamic Entrepreneurship dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, Maslahat dan Cerdas Tahun 2029".

MISI

1. Menyediakan akses dan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, terintegrasi, adil, merata, toleran, inklusif, hijau, ramah dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional;
2. Meningkatkan kapasitas, kuantitas, dan kualitas sumber daya manusia civitas akademika untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing internasional;
3. Mengembangkan riset unggulan berbasis kearifan lokal dan islami entreprenership untuk menghasilkan karya yang berdampak luas dan berkelanjutan serta berdaya saing global;
4. Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan islamic entrepreneurship yang berdampak nasional dan global;
5. Memperluas kerjasama kemitraan strategis nasional dan internasional untuk mendukung untuk memperkuat kemandirian dan reputasi universitas;
6. Meningkatkan tata kelola universitas yang baik (good university governance) berstandar internasional.

1. Gambaran Umum (Lanjutan)

e. Tujuan dan Sasaran UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan entrepreneurs yang unggul dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, inklusif, moderat, peduli lingkungan, beradab, cinta tanah air, kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta berdaya saing global;
2. Meningkatnya kapasitas, kuantitas, dan kualitas sumber daya manusia civitas akademika untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing internasional;
3. Menghasilkan riset unggulan berbasis kearifan lokal dan islamic entreprenership untuk yang berdampak luas dan berkelanjutan serta berdaya saing global;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan islamic entrepreneurship yang berdampak nasional dan global;
5. Terlaksananya kerjasama kemitraan strategis nasional dan internasional yang mendukung untuk memperkuat kemandirian dan reputasi universitas di level internasional;
6. Terwujudnya tata pamong dan tata kelola universitas sesuai prinsip Good University Governance berstandar International.

SASARAN

1. Perluasan akses, peningkatan kualitas layanan, relevansi dan daya saing serta pembinaan kemahasiswaan.
2. Peningkatan kapasitas, kuantitas dan kualitas SDM.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
4. Penguatan keterandalan sistem tatakelola dan otonomi kelembagaan.
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian universitas.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.
7. Peningkatan pengakuan kualitas pendidikan.

1. **Gambaran Umum** (Lanjutan)

f. **Susunan Organisasi dan Pejabat Pengelola Susunan Organisasi dan Pejabat Pengelola**

Struktur Dewan Pengawas BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah sebagai berikut:

Ketua Dewan Pengawas	: Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S. Ag, M.Si.
Anggota	: Dr. Mochamad Mulyono, SE, MM
	: Prof. Dr. Sri Rahayu, SE, MSA, Ak, CA.

Susunan Pengelola BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rektor	: Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd.
Wakil Rektor I	: Dr. Ayub Mursalin, S.Ag., M.A.
Wakil Rektor II	: Dr. Pahmi SY, S.Ag., M.Si.
Wakil Rektor III	: Dr. Jamaluddin, S.Ag., M.Pd.I.
Dekan Fak. Syariah	: Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, MA
Dekan Fak. Tarbiyah dan Keguruan	: Dr. Hj. Fadlilah, M.Pd.
Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi	: Prof. Dr. Ahmad Syukri, S.S, M.Ag
Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam	: Dr. Rafidah, S.E., M.EI.
Dekan Fak. Ushuluddin dan Studi	: Dr. H. Zikwan, M.Ag.
Dekan Fak. Sains dan Teknologi	: Arfan, S.Th.I., M.Soc.Sc., Ph.D.
Dekan Fak. Adab dan Humaniora	: Dr. Dian Mursyidah, M.Ag.
Direktur Pasca Sarjana	: Prof. Dr. Risnita, M.Pd.
Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI)	: Dr. Novi Mubyarto, ME, PIA

Sedangkan Struktur Pengelolaan Keuangan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	: Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana RM dan BLU	: Junaidi, S.Ag., M.Pd.I.
Pejabat Penandatanganan dan Penguji Tagihan SPM dan SP3B	: Ratna Sumarni, S.E.
Bendahara Pengeluaran	: Pitriani, S.Ag, M.Pd
Bendahara Penerimaan	: Nora Maulidya, S.HI, ME
Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai	: Huzaifah, S.E, ME

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Pokok-pokok kebijakan yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi

Laporan keuangan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi per 31 Desember 2024, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang serta Belanja Modal, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tak Terduga;
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL Tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal SILPA/SIKPA koreksi dan SAL akhir;
c) Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas;
d) Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas;
e) Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh entitas selama Tahun Anggaran 2024;
f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir; dan
g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Penerapan Accrual Basis digunakan dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan penerapan Cash Basis untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Accrual Basis adalah dasar akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Cash Basis adalah dasar akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

1. Basis Akuntansi (Lanjutan)

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasar basis kas sehingga pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas.

Basis akrual di Neraca pada Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan entitas, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Dasar Pengukuran

Kriteria pengakuan didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Entitas. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Entitas menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran Kas dan Setara Kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional, yaitu mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana BLU beroperasi.

3. Periode Akuntansi

Periode penyajian Laporan Keuangan berdasarkan tahun anggaran penyelenggaraan Badan Layanan Umum (BLU) untuk Tahun Anggaran 2024 dimulai dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

4. Pendapatan - LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara (KUN). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA, dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

4. Pendapatan - LRA (Lanjutan)

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs dengan Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

5. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan - LO diakui pada saat:
- BLU UIN memiliki hak atas pendapatan;
- BLU UIN menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs dengan Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pendapatan – LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

6. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat:
- Terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

7. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban;
- Timbulnya Konsumsi aset;
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar dapat diakui sebagai beban.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional entitas.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis beban yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban persediaan, beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyisihan piutang tak tertagih, serta beban penyusutan dan amortisasi.

8. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan, diharapkan dapat diperoleh oleh BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan, yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset terdiri dari Aset Lancar Aset Tetap Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

8.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid atau siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank/simpanan yang sewaktu-waktu dapat dicairkan, dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

8.2 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke kas Negara. Terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 1068 tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama menyatakan bahwa tagihan atas UKT mahasiswa diakui sebagai Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

8.3 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU UIN dan atau hak BLU UIN yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang dan jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Piutang dicatat dengan nilai nominal dan diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) . Hal ini diwujudkan dalam bentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penyisihan piutang tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan. Perhitungan penyisihan adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo.	5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN.	

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

8.4 Beban Dibayar Dimuka

Pembayaran dimuka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar dimuka digunakan untuk membiayai kepentingan operasional jangka panjang BLU.

8.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLU, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan adalah aset yang digunakan kembali untuk proses operasi dalam rangka pemberian jasa kepada pihak ketiga. Adapun nilai persediaan yang disajikan pada laporan keuangan ini menyesuaikan dengan kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku pada instansi pemerintah. Pada saat pengakuan awal, persediaan diakui sebesar biaya perolehan (historical cost), yang meliputi biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipakai. Selanjutnya, persediaan dinilai sebesar mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto.

Penyisihan atas persediaan usang dan bergerak lambat (slow moving) ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan pada akhir periode pelaporan untuk menyesuaikan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- Harga pembelian awal akan dibedakan dengan harga pembelian terakhir
- Barang yang dikeluarkan terlebih dahulu adalah barang yang dibeli lebih awal
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S 17/PB/PB.6/2021 mengenai Rilis Aplikasi Persediaan Versi 21.0.0 merupakan pengembangan dari Aplikasi Persediaan versi sebelumnya yang telah menggunakan metode penilaian First-In First-Out (FIFO), dimana metode penilaian yang sebelumnya digunakan adalah Harga Perolehan Terakhir (HPT).

Hal ini sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/20221 tanggal 22 Januari 2021, hal Penerapan Metode FIFO, bahwa mulai tahun 2021 metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode FIFO. Demikian pula untuk update Aplikasi SIMAK BMN versi 21.0.0.

8.6 Investasi Jangka Panjang

Adalah investasi yang dimaksudkan dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non-permanen.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

8.7 Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klarifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah

Adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah dinilai dengan biaya perolehan, jika tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada tanggal perolehan, dan disajikan sebesar nilai moneternya.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan, dan disajikan sebesar nilai moneternya. Terhadap Peralatan dan Mesin dalam pelaporan keuangan ini telah dilakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan nilai pasar (market data approach) dengan melakukan perbandingan harga penjualan peralatan dan mesin yang sejenis dan tahun yang sama.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh Gedung dan Bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan, maka didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada tanggal perolehan. Terhadap gedung dan bangunan dalam pelaporan keuangan ini telah dilakukan penilaian dengan pendekatan biaya (cost approach) , yaitu dengan cara menghitung keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bangunan pada kondisi baru sesuai dengan penilaian.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai, termasuk di dalamnya Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi dan Jaringan. Terhadap infrastruktur dalam pelaporan keuangan ini telah dilakukan penilaian dengan biaya perolehan.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Aset tetap lainnya dinilai berdasarkan biaya perolehannya.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

8.7 Aset Tetap (Lanjutan)

f) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan, mencakup Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses Konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset - aset tersebut siap untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai Tahun Anggaran 2018 nilai satuan minimum aset tetap sebagai berikut:

a) Sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), untuk :
   a. Peralatan dan mesin; atau
   b. Aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
b) Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk :
   a. Gedung dan Bangunan; atau
   b. Aset Tetap renovasi gedung dan bangunan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak diperlukan untuk aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan; konstruksi dalam pengerjaan; dan aset tetap lainnya. Aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap disajikan dalam neraca, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan tidak disajikan dalam neraca.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

8.7 Aset Tetap (Lanjutan)

Penyusutan

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor sebagaimana diubah dengan PMK No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK No. 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa manfaat penyusutan aset tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui KMK No. 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, secara umum tabel masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a) Tanah
b) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan Penghapusan.

Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa manfaat penyusutan aset tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan KMK No. 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, secara umum tabel masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen diberhentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

8.7 Aset Tetap (Lanjutan)

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Banguna Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilakukan pemanfaatan. Pelaksanaan Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutan adalah nol. Dalam hal aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada laporan keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisihnya diakui sebagai pengurang ekuitas pada laporan keuangan.

8.8 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Penjabaran dari jenis-jenis aset lainnya antara lain sebagai berikut:

a) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hal kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright) , paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam Pengembangan.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

8.8 Aset Lainnya (Lanjutan)

a) Aset Tak Berwujud (Lanjutan)

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten, Brand/ Merk , Desain Industri, Resep Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa. Perlindungan Varietas	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

b) Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak termasuk ke dalam aset lainnya aset tak berwujud, tagihan penjualan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya dan aset yang dikelola pihak lain.

8.9 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan atau dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

9. Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Jenis Kewajiban Jangka Pendek antara lain:

a) Utang Usaha yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional misalnya utang biaya.
b) Utang Pajak yaitu kewajiban yang timbul kepada negara berupa pembayaran pajak.
c) Biaya yang Masih Harus Dibayar yaitu biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal neraca termasuk accrued interest.
d) Pendapatan Diterima di Muka yaitu penerimaan pendapatan dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLU belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga.
e) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yaitu bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
f) Utang Jangka Pendek Lainnya yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a) sampai e) di atas.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

9. Kewajiban (Lanjutan)

1) Kewajiban Jangka Pendek (Lanjutan)

Kewajiban Jangka Pendek dinilai sebesar nilai nominal kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian oleh BLU.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/ diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban jangka panjang tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca apabila:

a) Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b) BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang didukung dengan perjanjian kembali atau penjadualan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nominal utang jangka panjang

10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLU pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dua belas kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

	2025	
	Anggaran	**Realisasi**
Pendapatan		
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	90.282.886.000	91.534.984.864
Jumlah Pendapatan	**90.282.886.000**	**91.534.984.864**
Belanja		
Belanja Pegawai	102.828.637.000	95.252.724.842
Belanja Barang	113.632.366.000	91.301.723.900
Belanja Modal	11.340.755.000	10.818.848.339
Belanja Bantuan Sosial	21.958.200.000	21.958.200.000
Jumlah Belanja	**249.759.958.000**	**219.331.497.081**

Selama Tahun 2025, BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah melakukan revisi anggaran sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Alasan Revisi
1.	21 Februari 2025	Revisi Efisiensi Anggaran sesuai Inpres 1 Tahun 2025, blokir self assesment sebanyak Rp.49.309.684.000,- anggaran RM, BOPTN dan BLU.
2.	28 Februari 2025	Revisi Penggunaan Saldo Awal BLU, Hibah, POK dan Halaman III Dipa. Berdasarkan Perintah Rektor untuk melakukan revisi penggunaan Saldo Awal BLU sebagai tambahan anggaran menutupi kekurangan belanja remunerasi sebanyak Rp.21.000.000.000,- Hibah sebesar Rp.250.000.000,- dari Bank Jambi Syariah, Revisi POK untuk unit kerja internal, sekaligus revisi penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) Halaman III Dipa untuk triwulan I.
3.	11 Maret 2025	Revisi DIPA POK Pagu Tetap. Berdasarkan Perintah Rektor untuk melakukan revisi sesuai usulan permintaan dari PPK, Fakultas dan unit-unit.
4.	09 April 2025	Revisi Relokasi anggaran Kopertais dan Buka Blokir Efisiensi pagu anggaran BOPTN di DJA Kemenkeu RI. Revisi dilakukan karena mendapatkan tambahan anggaran untuk kopertais dan pembukaan anggaran BOPTN secara keseluruhan dengan difasilitasi oleh Pendis Kemenag RI.
5.	24 April 2025	Revisi DIPA POK Pagu Tetap dan Halaman III. Dipa, Revisi dilakukan berdasarkan Perintah Pimpinan untuk serta penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) untuk triwulan II sesuai surat dari Kanwil DJPB.
6.	11 Juli 2025	Revisi DIPA POK Pagu Tetap dan Halaman III. Dipa, Revisi dilakukan berdasarkan Perintah Pimpinan untuk serta penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) untuk triwulan III sesuai surat dari Kanwil DJPB.
7.	25 Agustus 2025	Revisi Relaksasi Buka Blokir Efisiensi pagu anggaran BLU di DJA Kemenkeu RI. Revisi dilakukan karena mendapatkan pembukaan anggaran BLU secara keseluruhan dengan difasilitasi oleh Pendis Kemenag RI.
8.	26 Agustus 2025	Revisi Pemutakhiran POK untuk perubahan akun gaji PPNPM dan pagu minus belanja pegawai.
9.	02 Oktober 2025	Revisi DIPA POK Pagu Tetap dan Halaman III. Dipa, Revisi dilakukan berdasarkan Perintah Pimpinan untuk penyesuaian hasil relaksasi efisiensi BLU sekaligus penyesuaian RKAKL fakultas dan unit kerja internal, serta penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) untuk triwulan IV, revisi ini sekaligus revisi terakhir untuk fakultas dan unit kerja internal di tahun 2025.
10.	13 November 2025	Revisi DIPA Pemutakhiran POK Pagu Tetap. Berdasarkan Perintah Pimpinan untuk melakukan revisi untuk penyesuaian belanja terkait kegiatan yang mendesak.
11.	19 Desember 2025	Revisi DIPA Pemutakhiran POK Pagu Tetap.
12.	29 Desember 2025	Revisi terkait penambahan pagu belanja pegawai di DJA Kemenkeu RI. Revisi dilakukan karena mendapatkan tambahan anggaran untuk belanja pegawai PNS dan PPPK yang sudah kurang sejak awal tahun, revisi ini secara keseluruhan difasilitasi oleh Pendis Kemenag RI.

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

a. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.90.916.423.280 atau mencapai 101% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.90.282.886.000. Pendapatan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum dan PNBP Lainnya.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

	2025		
	Anggaran	**Realisasi**	**%Realisasi**
Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	87.846.000.000	87.620.614.290	100
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	43.560.000	12.531.000	29
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	629.520.000	1.217.838.613	193
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	541.807.000	819.984.754	151
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	-	93.993.200	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	525.479.000	209.465.928	40
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	110.880.000	94.070.000	85
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	585.640.000	369.400.000	63
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri Lembaga Badan Usaha Uang	-	350.000.000	-
Pendapatan Lain-lain BLU	-	128.525.495	-
Jumlah Pendapatan BLU	**90.282.886.000**	**90.916.423.280**	**101**
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	187.006.000	100
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	363.010.000	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	3.017.676	100
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	48.199.464	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	17.328.444	-
Jumlah PNBP Lainnya	**-**	**618.561.584**	**-**
Jumlah	**90.282.886.000**	**91.534.984.864**	**101**

Realisasi pendapatan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.91.534.984.864 dan Rp.89.395.333.299. Realisasi pendapatan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar (2%) dari realisasi TA 2024, dengan rincian sebagai berikut:

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

a. Pendapatan (Lanjutan)

	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%Naik (Turun)
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)			
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	87.620.614.290	85.441.683.812	3
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	12.531.000	19.000.000	-34
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	1.217.838.613	125.882.117	867
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	819.984.754	532.652.105	54
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	93.993.200	175.235.735	-46
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	209.465.928	630.899.999	-67
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	94.070.000	87.550.000	7
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	369.400.000	443.998.155	-17
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri Lembaga Badan Usaha Uang	350.000.000	-	-
Pendapatan Lain-lain BLU	128.525.495	1.838.271.419	-93
Jumlah Pendapatan BLU	**90.916.423.280**	**89.295.173.342**	**2**
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	187.006.000	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	363.010.000	-	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	3.017.676	3.721.469	-19
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	48.199.464	29.809.238	62
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	17.328.444	66.629.250	-74
Jumlah PNBP Lainnya	**618.561.584**	**100.159.957**	**518**
Jumlah	**91.534.984.864**	**89.395.333.299**	**2**

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

b. Belanja

Realisasi belanja periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp.219.297.603.867 atau mencapai 88% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.249.759.958.000. Belanja UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial. Rincian estimasi dan realisasi belanja sebagai berikut:

	2025		
	Anggaran	**Realisasi**	**%Realisasi**
Belanja Pegawai	102.828.637.000	95.252.724.842	93
Belanja Barang	113.632.366.000	91.301.723.900	80
Belanja Modal	11.340.755.000	10.818.848.339	95
Belanja Bantuan Sosial	21.958.200.000	21.958.200.000	100
Total Belanja Kotor	**249.759.958.000**	**219.331.497.081**	**88**
Pengembalian Belanja	-	33.893.214	-
Belanja Netto	**249.759.958.000**	**219.297.603.867**	**88**

Realisasi belanja TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.219.331.497.081 dan Rp.222.840.231.346. Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 02% dari realisasi TA 2024.

	Realisasi 2025	**Realisasi 2024**	**%Naik (Turun)**
Belanja Pegawai	95.252.724.842	85.448.396.457	11
Belanja Barang	91.301.723.900	109.240.200.262	-16
Belanja Modal	10.818.848.339	8.193.234.627	32
Belanja Bantuan Sosial	21.958.200.000	19.958.400.000	10
Jumlah	**219.331.497.081**	**222.840.231.346**	**-2**

1) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.95.252.724.842 dan Rp.85.448.396.457. Realisasi belanja pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 11% dari realisasi TA 2024.

Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

	Realisasi 2025	**Realisasi 2024**	**%Naik (Turun)**
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	66.289.215.825	64.155.119.774	3
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	16.389.306.851	11.935.345.337	37
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	10.825.110.500	7.766.652.800	39
Belanja Uang Lembur	1.750.812.000	1.609.201.000	9
Pengembalian Belanja Pegawai	(1.720.334)	(17.922.454)	-90
Jumlah	**95.252.724.842**	**85.448.396.457**	**11**

2) Belanja Barang

Realisasi belanja barang TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.91.301.723.900 dan Rp.109.240.200.262. Realisasi belanja modal TA 2025 mengalami penurunan sebesar 16% dari realisasi TA 2024.

Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

	Realisasi 2025	**Realisasi 2024**	**%Naik (Turun)**
Belanja Barang	8.029.094.607	10.346.117.100	-22
Belanja Jasa	1.608.384.510	3.256.053.364	-51
Belanja Pemeliharaan	1.680.396.717	2.588.710.082	-35
Beban Perjalanan Dinas dalam Negeri	211.590.000	1.171.401.200	-82
Belanja Barang untuk Persediaan	970.467.996	1.069.371.594	-9
Belanja Barang BLU	78.803.310.070	90.824.517.682	-13
Pengembalian Belanja Barang	(1.520.000)	(15.970.760)	-90
Jumlah	**91.301.723.900**	**109.240.200.262**	**-16**

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

b. Belanja (Lanjutan)

3) Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.10.818.848.339 dan Rp.8.193.234.627. Realisasi jumlah belanja modal TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 32% dari TA 2024.

Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%Naik (Turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.199.977	920.813.200	-86
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	52.285.440	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	97.500.000,00	-
Belanja Modal - BLU	10.640.362.922	7.174.921.427	48
Jumlah	**10.818.848.339**	**8.193.234.627**	**32**

4) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.21.958.200.000 dan Rp.19.958.400.000.

Realisasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 10% dari Realisasi TA 2024.

	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%Naik (Turun)
Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	21.958.200.000	19.958.400.000	10
Jumlah	**21.958.200.000**	**19.958.400.000**	**10**

6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAAN SALDO ANGGARAN LEBIH

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal pada tanggal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.25.962.087.647 dan Rp.34.666.353.414.

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Jumlah Penggunaan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

c. Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Jumlah Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp.127.796.512.217) dan (Rp.133.444.898.047).

d. Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian

Jumlah Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp.1.472.750.288) dan (Rp.8.704.265.767). Jumlah Penyesuaian SiLPA/SiKPA diketahui hanya berasal dari Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN, berikut rincian transaksi penyesuaian SiLPA/SiKPA:

Penyesuaian SiLPA/SiKPA

Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Alokasi APBN	129.887.824.089	124.840.792.237	4
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(618.561.584)	(100.159.957)	518

e. Saldo Anggaran Lebih/ (Kurang) Akhir

Saldo anggaran lebih akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.27.434.837.935 dan Rp.25.962.087.647.

5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

	2025	2024
Kas di Bendahara Pengeluaran		
UP Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

b. Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 27.434.837.935 dan Rp 25.962.087.647.

Rincian kas pada Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Kas pada Badan Layanan Umum		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (7005932388)	5.041.348.792	7.339.846.273
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (7001419026)	17.222.655.803	18.118.738.593
RPL 012 BLU UIN JAMBI UTK PKD Bank Mandiri Taspen	5.000.000.000	-
PT Bank Mandiri (1100016298298)	170.833.340	428.801.266
BPG 012 PT Bank Mandiri Persero Tbk. (1100004668296)	-	74.701.515
Jumlah	**27.434.837.935**	**25.962.087.647**

c. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 762.070.875 dan Rp 1.565.657.187.

Rincian Kas lainnya dan setara kas sebagai berikut:

	2025	2024
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (9800980008)	762.070.875	1.565.657.187
Jumlah	**762.070.875**	**1.565.657.187**

5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

d. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo pendapatan yang masih harus diterima untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 84.494.000 dan Rp 176.528.000.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima muncul diakibatkan adanya mahasiswa yang belum membayarkan UKT sampai dengan 31 Desember 2024 dengan sebagai berikut:

	2025	2024
UKT Mahasiswa	84.494.000	176.528.000
Jumlah	**84.494.000**	**176.528.000**

e. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 5.625.000 dan Rp 0.

	2025	2024
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU		
Piutang Sewa Ruangan	6.250.000	-
Jumlah	**6.250.000**	-
Cadangan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU yang Tak Tertagih		
Penyisihan Piutang	- 625.000	-
Jumlah	**(625.000)**	-
Jumlah Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	**5.625.000**	-

f. Persediaan

Saldo persediaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.397.984.523 dan Rp 743.352.110 dengan rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Barang Konsumsi	1.397.984.523	743.352.110
Jumlah	**1.397.984.523**	**743.352.110**

g. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap - Bersih pada BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.006.097.377.001 dan Rp 1.055.241.097.499 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Tanah	373.107.997.000	-	-	373.107.997.000
Peralatan dan Mesin	130.447.545.635	12.127.480.220	-	142.575.025.855
Gedung dan Bangunan	658.101.586.961	493.976.080	5.724.541.250	652.871.021.791
Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.443.440.021	8.075.258.095	871.715.000	24.646.983.116
Aset Tetap Lainnya	6.268.788.138	344.380.000	-	6.613.168.138
KDP	22.134.422.038	-	22.134.422.038	-
Jumlah	**1.207.503.779.793**	**21.041.094.395**	**28.730.678.288**	**1.199.814.195.900**
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan Mesin	83.046.712.153	20.586.660.383		103.633.372.536
Gedung dan Bangunan	57.703.824.346	14.621.128.802	2.332.321.364	69.992.631.784
Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.313.395.795	8.789.993.635	211.324.851	19.892.064.579
Aset Tetap Lainnya	198.750.000			198.750.000
Jumlah	**152.262.682.294**	**43.997.782.820**	**2.543.646.215**	**193.716.818.899**
Nilai Buku Bersih	**1.055.241.097.499**			**1.006.097.377.001**

5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

g. Aset Tetap (Lanjutan)

	Tahun 2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Tanah	373.107.997.000	-	-	373.107.997.000
Peralatan dan Mesin	126.270.713.370	4.823.632.265	646.800.000	130.447.545.635
Gedung dan Bangunan	655.184.525.948	2.917.061.013	-	658.101.586.961
Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.236.718.413	206.721.608	-	17.443.440.021
Aset Tetap Lainnya	6.191.718.397	139.464.741	62.395.000	6.268.788.138
KDP	22.134.422.038	-	-	22.134.422.038
Jumlah	**1.200.126.095.166**	**8.086.879.627**	**709.195.000**	**1.207.503.779.793**
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan Mesin	64.289.766.190	18.756.945.963	-	83.046.712.153
Gedung dan Bangunan	42.980.429.668	14.723.394.678	-	57.703.824.346
Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.494.354.203	819.041.592	-	11.313.395.795
Aset Tetap Lainnya	198.750.000	-	-	198.750.000
Jumlah	**117.963.300.061**	**34.299.382.233**	**709.195.000**	**152.262.682.294**
Nilai Buku Bersih	**1.082.162.795.105**			**1.055.241.097.499**

h. Aset Lainnya

Saldo aset lainnya bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 5.262.585.668 dan Rp 1.449.714.095 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Aset Tak Berwujud	3.600.555.720	3.546.165.720
Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah (YTDDOP)	6.596.256.250	646.800.000
Akumulasi Amortisasi:		
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.216.442.500)	(2.096.451.625)
Akumulasi Penyusutan:		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap YTDDOP	(2.717.783.802)	(646.800.000)
Jumlah	**5.262.585.668**	**1.449.714.095**

i. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 950.490.225 dan Rp 1.795.059.285.

Rincian utang kepada pihak ketiga, adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Beban Langganan Daya dan Jasa		
Pembayaran Berlangganan Telepon	-	-
Pembayaran Berlangganan Listrik	183.823.395	210.940.848
Pembayaran Berlangganan Air	4.595.955	18.461.250
Utang kepada pihak ketiga Lainnya		
Dana Pihak Ketiga Lainnya	762.070.875	1.565.657.187
Jumlah	**950.490.225**	**1.795.059.285**

j. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 314.074.073 dan Rp 503.814.815.

Rincian pendapatan diterima dimuka, adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Sewa Lahan Gedung	14.814.814	123.166.667
Sewa Lahan Tanah	299.259.259	380.648.148
Jumlah	**314.074.073**	**503.814.815**

5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

k. Ekuitas

Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.039.780.410.704 dan Rp 1.082.839.562.438 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Ekuitas Awal	1.082.839.562.438	1.118.878.020.991
Surplus/Defisit LO	(43.473.862.240)	(36.038.458.553)
Koreksi Penambahan (Pengurangan) Ekuitas:		
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	(8.022.972.655)	-
Koreksi Lainnya	8.437.683.161	-
Jumlah	**1.039.780.410.704**	**1.082.839.562.438**

6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 222.611.517.106 dan Rp 213.347.969.289, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan dari Alokasi APBN	129.887.824.089	124.840.792.237
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	87.528.580.290	84.860.476.393
Pendapatan Hibah BLU	2.147.306.195	-
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	1.230.369.613	255.356.657
Pendapatan BLU Lainnya	1.817.436.919	3.391.344.002
Jumlah	**222.611.517.106**	**213.347.969.289**

b. Beban Operasional

1) Beban Pegawai

Saldo beban pegawai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 143.077.883.799 dan Rp 133.671.142.114.

	2025	2024
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	66.287.495.491	64.137.506.510
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	16.389.306.851	11.935.036.147
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	10.825.110.500	7.766.652.800
Beban Lembur	1.750.812.000	1.609.201.000
Beban Gaji dan Tunjangan BLU	47.825.158.957	48.222.745.657
Jumlah	**143.077.883.799**	**133.671.142.114**

2) Beban Persediaan

Saldo beban persediaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.291.733.161 dan Rp 2.529.398.480.

	2025	2024
Beban Persediaan Konsumsi	1.291.733.161	2.529.398.480
Jumlah	**1.291.733.161**	**2.529.398.480**

3) Beban Barang dan Jasa

Saldo beban barang dan jasa untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 34.123.263.503 dan Rp 42.186.408.556.

	2025	2024
Beban Keperluan Kantor	1.214.700.000	299.158.600
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	24.000.000
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3.757.385.000	7.058.517.500
Beban Bahan	161.263.806	512.891.000
Beban Honor Output Kegiatan	69.470.000	179.500.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.739.475.791	2.243.065.000
Beban Peralatan dan Mesin Ekstrakompatibel	85.500.010	28.985.000
Beban Langganan Listrik	1.208.597.054	-
Beban Langganan Telepon	-	45.954.787
Beban Langganan Air	150.192.161	420.550.000
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	2.388.000.000
Beban Sewa	-	2.000.000
Beban Jasa Profesi	129.350.000	327.950.000
Beban Jasa Lainnya	106.000.000	73.197.300
Beban Barang BLU	8.137.041.597	11.580.542.174
Beban Jasa BLU	5.984.037.989	6.478.213.569
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	9.557.592.429	10.126.054.392
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakompatibel BLU	822.657.666	397.829.234
Jumlah	**34.123.263.503**	**42.186.408.556**

6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

b. Beban Operasional (Lanjutan)

4) Beban Pemeliharaan

Saldo beban pemeliharaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3.517.799.517 dan Rp 4.626.184.749.

	2025	2024
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	439.662.000	464.916.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.210.514.717	2.074.782.082
Beban Pemeliharaan Jaringan	30.000.000	49.012.000
Beban Pemeliharaan BLU	1.827.420.790	2.007.169.167
Beban Pemeliharaan Bahan untuk Pemeliharaan	10.202.010	30.305.500
Jumlah	**3.517.799.517**	**4.626.184.749**

5) Beban Perjalanan Dinas

Jumlah beban pemeliharaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3.848.153.601 dan Rp 11.496.937.060.

	2025	2024
Beban Perjalanan Biasa	211.590.000	1.050.540.920
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	104.889.520
Beban Perjalanan BLU	3.636.563.601	10.341.506.620
Jumlah	**3.848.153.601**	**11.496.937.060**

6) Beban Bantuan Sosial

Jumlah beban pemeliharaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 21.958.200.000 dan Rp 19.958.400.000.

	2025	2024
Beban Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang	21.958.200.000	19.958.400.000
Jumlah	**21.958.200.000**	**19.958.400.000**

7) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 36.227.291.927 dan Rp 35.121.913.358.

	2025	2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	20.545.013.683	19.403.745.963
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.621.128.802	14.723.394.678
Beban Penyusutan Jalan, Jembatan & Irigasi	767.020.980	819.041.592
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	119.990.875	175.731.125
Jumlah	**36.227.291.927**	**35.121.913.358**

6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

8) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah beban penyisihan piutang tak tertagih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 625.000 dan Rp 0.

	2025	2024
Beban Penyisihan Piutang Sewa Ruangan BLU	625.000	-
Jumlah	**625.000**	**-**

c. Kegiatan Non-Operasional

Akun ini terdiri dari :

1) Surplus (Defisit) dari Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah surplus (defisit) dari penjualan aset non lancar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp 21.584.406.038) dan Rp 0.

	2025	2024
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	550.016.000	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(22.134.422.038,00)	-
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	**(21.584.406.038)**	**-**

2) Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah surplus (defisit) dari kegiatan non operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp 456.022.800) dan Rp 203.956.475.

	2025	2024
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	162.538.784	304.116.432
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(618.561.584,00)	100.159.957
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	**(456.022.800)**	**203.956.475**

7. PENJELASAN ATAS POS-POS ARUS KAS

a. Arus Kas Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp 11.741.582.627) dan (Rp 511.031.140) dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Arus Kas Masuk	220.872.792.953	214.236.125.536
Arus Kas Keluar	(209.131.210.326)	(214.747.156.676)
	11.741.582.627	**(511.031.140)**

1) Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas operasi pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 220.872.792.953 dan Rp 214.236.125.536, yang berasal dari:

	2025	2024
Pendapatan dari Alokasi APBN	129.887.824.089	124.840.792.237
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	87.620.614.290	85.441.683.812
Pendapatan dari Hasil Kerjasama	1.230.369.613	144.882.117
Pendapatan dari Hibah	350.000.000	-
Pendapatan Usaha Lainnya	1.621.446.177	3.533.371.678
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	93.993.200	175.235.735
Pendapatan PNBP Umum	68.545.584	100.159.957
Jumlah	**220.872.792.953**	**214.236.125.536**

2) Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.209.131.210.326 dan Rp.214.747.156.676, yang berasal dari:

	2025	2024
Pembayaran Pegawai	143.077.883.799	133.671.142.114
Pembayaran Barang	16.987.493.870	22.324.488.508
Pembayaran Jasa	7.619.159.952	9.716.645.062
Pembayaran Barang Menghasilan Persediaan	1.956.567.584	2.757.450.334
Pembayaran Pemelihaan	3.507.597.507	4.595.879.249
Pembayaran Perjalanan Dinas	3.848.153.601	11.496.937.060
Pembayaraan Barang dan Jasa BLU Lainnya	9.557.592.429	10.126.054.392
Pembayaraan Bantuan Sosial	21.958.200.000	19.958.400.000
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	618.561.584	100.159.957
Jumlah	**209.131.210.326**	**214.747.156.676**

b. Arus Kas Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi dari perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp.10.268.832.339) dan (Rp.8.193.234.627) dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Arus Kas Masuk	550.016.000	-
Arus Kas Keluar	(10.818.848.339)	(8.193.234.627)
	(10.268.832.339)	**(8.193.234.627)**

7. PENJELASAN ATAS POS-POS ARUS KAS (Lanjutan)

b. Arus Kas Aktivitas Investasi (Lanjutan)

1) Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas investasi pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 550.016.000 dan Rp 0, yang berasal dari:

	2025	2024
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	187.006.000	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya / Aset Lainnya	363.010.000	-
Jumlah	**550.016.000**	**-**

2) Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas investasi pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 10.818.848.339 dan Rp 8.193.234.627, yang berasal dari:

	2025	2024
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	9.873.816.819	4.823.632.265
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	493.976.080	2.917.061.013
Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.285.440	206.721.608
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	398.770.000	245.819.741
Jumlah	**10.818.848.339**	**8.193.234.627**

c. Arus Kas Aktivitas Transitoris

Arus kas dari Aktivitas Transitoris merupakan perhitungan Pihak Ketiga berasal dari saldo kredit ataupun saldo debit akun-akun pada buku besar akrual untuk utang kepada pihak ketiga atas penerimaan atau pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2025 dan adalah sebesar Rp 803.586.312 dan Rp 426.367.614 dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Arus Kas Masuk	762.070.875	1.565.657.187
Arus Kas Keluar	(1.565.657.187)	(1.139.289.573)
	(803.586.312)	**426.367.614**

1) Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 762.070.875 dan Rp 1.565.657.187, yang berasal dari:

	2025	2024
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	762.070.875	1.565.657.187
Jumlah	**762.070.875**	**1.565.657.187**

2) Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 1.565.657.187 dan Rp 1.139.289.573, yang berasal dari:

	2025	2024
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	1.565.657.187	1.139.289.573
Jumlah	**1.565.657.187**	**1.139.289.573**

8. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

a. Ekuitas Awal

Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.082.839.562.438 dan Rp 1.118.878.020.991.

b. Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp.43.473.862.240) dan (Rp.36.038.458.553).

c. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing adalah sebesar 8022972655 dan (Rp 0).

d. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing adalah sebesar (Rp.0) dan (Rp.0).

e. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing adalah sebesar Rp 8.437.683.161 dan Rp 0.

f. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp 1.039.780.410.704 dan Rp 1.082.839.562.438.

9. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen BLU UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diselesaikan pada tanggal 30 April 2026.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Lampiran I

No.	Nama Rekanan	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Pengakuan Pendapatan		Pendapatan diterima dimuka	Keterangan
						s.d 31 Des 2024	31 Des 2025		
1	Protelindo	355.555.555	120	Juni 2024	Mei 2034	20.740.741	35.555.556	299.259.259	lahan (424921)
3	Ruko Pegadaian	44.444.444	24	September 2024	Agustus 2026	7.407.407	22.222.222	14.814.815	ruang (424923)
TOTAL						**28.148.148**	**57.777.778**	**314.074.074**	